

Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Gampong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong Bagi Ibu-Ibu PKK di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

**Muhammad Munzir¹, Fadli Syahputra^{2*}, Kamal Fachrurrozi³,
Sry Rasyidu Tebe⁴, Muhammad Zainal Abidin⁵**

¹Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM), Manajemen, Kota Banda Aceh, Indonesia

²Akademi Farmasi YPPM Mandiri, Farmasi, Kota Banda Aceh, Indonesia

^{1,2}PW Aceh Gerakan Tani Syarikat Islam (GERTASI), Banda Aceh, Indonesia

^{3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM), Manajemen, Kota Banda Aceh, Indonesia

Email Korespondensi: fadlimeuraxa@gmail.com

Abstrak

Kunci utama manajemen adalah orang karena aspek ini akan sangat menentukan keberhasilan usaha desa/gampong. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pengelola usaha ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus/pengelola usaha ini melalui pelatihan manajemen. Badan usaha gampong dalam pengelolaan operasionalnya memerlukan pengelola yang baik. BUMG Doy menyediakan kebutuhan barang dan makanan yang diperlukan untuk rumah tangga, dimana mayoritas (90%) warga Gampong Doy berprofesi sebagai pembuat/usaha krupuk tempe, pertanian dan perkebunan. Tujuan pendampingan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam upaya penyempurnaan alat dan pengelolaan BUMG dan PKK Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Dengan selesainya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan agar lebih mempererat hubungan dan kerja sama antara Pengurus BUMG dan Pengurus PKK Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan STIM Banda Aceh.

Abstract

The main key to management is people because this aspect will significantly determine the success of the village/gampong business. One way to improve the ability of these business managers is to increase the knowledge and skills of the management/business managers through management training. Gampong business entities in their operational management require good managers. BUMG Doy provides goods and food for households, where most (90%) of Gampong Doy residents work as tempe crackers/businesses in agriculture and plantations. This assistance aims to obtain input in efforts to improve the tools and management of BUMG and PKK Gampong Doy, Ulee Kareng District, Banda Aceh City achieve their goals optimally. With the completion of this community service activity, it is hoped that it will further strengthen the relationship and cooperation between BUMG Management and PKK Gampong Doy Management, Ulee Kareng District, Banda Aceh City, with STIM Banda Aceh.

Keywords: Management Training; Village-Owned Enterprises; Village Original Income

PENDAHULUAN

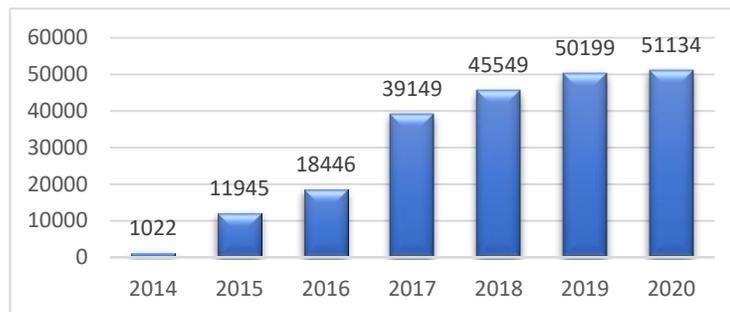
BUMDes/BUMDG merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial

masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pada hakikatnya BUMDes bukan merupakan hal yang baru, BUMDes telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undang terkait desa atau pemerintah daerah sebelum UU Desa terbit pada tahun 2014. BUMDes telah dahulu diatur dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Alfiansyah, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3 bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah; (a) meningkatkan perekonomian Desa; (b) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; (c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; (d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; (e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (f) membuka lapangan kerja; (g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan (h) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Terhitung sudah enam tahun sejak digulirkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun, keberadaan BUMDes belum sepenuhnya tersebar di seluruh penjuru tanah air. Data Potensi Desa (PODES) 2020 mencatat, dari 74.500 desa, 72% memiliki BUMDes. Sementara 21 ribu diantaranya tidak memiliki BUMDes. Kawasan Maluku dan Papua merupakan wilayah yang paling sedikit keberadaan BUMDes hanya 24% atau 2.183 desa dari total 9.265 desa. Padahal, total dana desa yang telah tersalurkan ke desa-desa di Indonesia sepanjang tahun 2015-2020 sebesar Rp.323.32,- Triliun. Terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 (selama 6 tahun) jumlah BUMDes di Indonesia meningkat pesat. Pada tahun 2014 BUMDes berjumlah 1.022 Unit menjadi 51.134 Unit di tahun 2020. Berikut grafik peningkatan jumlah BUMDes di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2020.

Gambar 1. Jumlah BUMDes di Indonesia Tahun 2014-2020



Sumber: Mendes PDDT dan BeritaSatu.com (2022)

Tahun 2020-2021 dikenang sebagai tahun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketika Undang-Undang Cipta Kerja melegalkan BUMDes/BUMG sebagai badan hukum. Hingga saat ini, jumlah BUMDes yang terbentuk 57.266 BUMDes, meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 51.134 BUM Desa (BeritaSatu.com, 2022).

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDes membuat desa-desa di Indonesia belum memiliki BUMDes. Bahkan di tingkat desa, masih banyak pemerintah desa yang tidak yakin BUMDes bisa menciptakan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemudian, akses informasi yang terbatas karena kondisi geografi sebagian besar desa menjadi kendala yang membuat warga kesulitan mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai seluk-beluk BUMDes. Misalnya desa-desa di wilayah kepulauan terpencil. Kendala kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi persoalan utama yang menghambat perkembangan BUMDes (Lokadata, 2020).

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, bahwa saat ini di Provinsi Aceh sudah berdiri BUMDes sebanyak 318 sudah terdaftar, hal tersebut merupakan jumlah BUMDes terbanyak secara nasional. Dalam hal ini, dengan kehadiran BUMD/BUMG di Provinsi Aceh diharapkan dapat menjadikan desa yang mandiri serta dapat mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun, mengingat BUMG masih termasuk hal yang baru yang dipraktekkan oleh masyarakat tidak bisa dipungkiri juga muncul beberapa kendala dalam hal pengelolaan BUMG yang sudah dibentuk (DPMG Aceh, 2021).

Realisasi PAD hingga Triwulan II 2020 didominasi oleh penerimaan dari Pemerintah Aceh dengan total Rp.1,05 triliun, atau secara persentase sebesar 52,38% dari total realisasi PAD di seluruh Aceh. Jauh lebih tinggi dari daerah dengan realisasi PAD terbesar kedua yaitu Kota Banda Aceh yang sebesar Rp.112,85 miliar atau secara persentase sebesar 5,63% dari total realisasi PAD di seluruh Aceh. Hal ini disebabkan sumber penerimaan pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak lebih besar jika dibandingkan dengan pajak kabupaten/kota (DJPAceh, 2020). BUMG diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu diharapkan dapat menjadi fondasi utuh bagi kemajuan bangsa dan negara. Bumdes berperan penting untuk menambah PAD yang tergabung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes). APBDDes sendiri berguna untuk menjalankan perekonomian desa sehingga muncul sifat kemandirian. Dalam pembentukan Bumdes diharuskan melakukan musyawarah antar elemen masyarakat desa. Seyogyanya, setiap satu tahun sekali diadakan musyawarah rencana pembangunan desa dengan memanfaatkan posisi BUMDes (Firdaus, 2020).

Kota Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi Aceh yang responsif terhadap tuntutan desa. Menjadi ibukota Provinsi Aceh yang merupakan provinsi yang berada pada urutan ketiga sebagai penerima kucuran dana desa terbesar di Indonesia setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendorong pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mencapai keefektifitasan dalam pengelolaan dana desa. Kota Banda Aceh menjadi salah satu daerah yang menerima kucuran dana desa yang relatif besar dimana secara kasat mata masyarakat melihat bahwa Banda Aceh cukup maju baik dari infrastruktur dan juga kondisi masyarakatnya. Kota yang dijuluki sebagai kota pelajar ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dilihat baik dari jumlah dana desa yang dikucurkan sampai kepada tingkat efektivitasnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, salah satu desa di Banda Aceh yaitu Gampong Lampaseh Aceh (Gusmeri et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016) dengan temuannya menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator mengalami peningkatan. Sedangkan menurut Ritonga

(2019), didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Ajamu dan desa Cinta Makmur untuk peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa dengan melihat indikator penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat desa cukup baik.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang ada di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh merupakan badan usaha yang relatif baru sehingga belum memiliki kekuatan untuk mengelola usaha gampong tersebut. Untuk itu, maka salah satu cara yang harus dilakukan oleh para pengelola adalah bagaimana memperkuat manajemen Badan Usaha Gampong tersebut sehingga keberadaan usaha desa tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang ada di Gampong Doy tersebut. Kunci utama di dalam manajemen adalah *man* (orang) karena aspek *man* ini akan sangat menentukan keberhasilan usaha desa/gampong ini. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pengelola usaha ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus/pengelola usaha ini melalui pelatihan manajemen. Badan usaha gampong dalam pengelolaan operasionalnya memerlukan pengelola yang baik. Menurut Maskan *et al.*, (2020) bahwa manajemen secara sederhana diartikan sebagai cara bagaimana kita mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Oleh karena itu, suatu organisasi, baik yang bersifat profit oriented maupun nirlaba ataupun pemerintah maupun swasta memerlukan manajer yang baik. Hal ini menjadi hal yang penting dengan alasan dua hal, yaitu, pertama, secara internal dengan pengelola (manajer) yang baik dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Adapun alasan kedua adalah bahwa secara eksternal persaingan bisnis semakin meningkat. Lebih-lebih kalau diingat bahwa daya saing perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan produk yang memiliki *competitive advantage* sehingga kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan dapat terjamin di masa mendatang.

Potensi yang dimiliki mitra untuk mengembangkan usahanya sebenarnya sangat besar. Hal ini disebabkan karena Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ini menyediakan kebutuhan barang dan makanan yang diperlukan untuk rumah tangga, dimana mayoritas (90%) warga Gampong Doy berprofesi sebagai pembuat/usaha krupuk tempe, pertanian dan perkebunan. Disamping itu juga BUMG dan PKK ini menyediakan usaha simpan pinjam bagi warga Gampong Doy, dimana lembaga ini ditujukan untuk membantu warga desa yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya maupun untuk keperluan keluarga. Dengan demikian, potensi berkembangnya BUMG ini sangat besar karena bidang usahanya sesuai kebutuhan masyarakatnya dan untuk memperolehnya tidak perlu birokrasi yang rumit, dekat dengan tempat tinggal dan harganya sangat terjangkau oleh masyarakat Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

PERMASALAHAN MITRA

Mengacu kepada analisa situasi di atas dan hasil diskusi dengan mitra, dimana masalah pengelolaan Badan Usaha Gampong dan PKK belum dilakukan dengan efektif, jadi persoalan yang dihadapi oleh BUMG dan PKK Gampong Doy adalah:

1. Kurangnya kemampuan mereka di bidang pengetahuan dan manajemen usaha bagi pengelola BUMG Doy dan Ibu PKK. Hal ini disebabkan karena kebanyakan para pengelola BUMG dan PKK

Gampong Doy memiliki latar pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Ketrampilan).

2. Belum memiliki pengalaman di bidang manajerial, sehingga ketrampilan manajemen usaha dan pelayanan masih minim.

METODE

Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah para Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Pengurus Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Untuk mendapatkan materi ini tentunya sangat penting bagi mereka. Hal ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu manajemen yang sangat pesat, yang tentunya perlu dimanfaatkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi mereka.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan praktis yang mengacu pada pokok permasalahan, yaitu peningkatan pengetahuan manajemen mitra. Adapun metode peningkatan pengetahuan manajemen adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman tentang Manajemen yang akan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan Pemahaman dan Ketrampilan tentang Fungsi Manajemen, yang akan dilakukan dengan pemberian edukasi kepada masyarakat;
3. Peningkatan Pemahaman tentang Bidang Manajemen, yang akan dilakukan dengan pendampingan;
4. Penerapan Manajemen Organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PKM dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa program studi D-3 Farmasi perguruan tinggi swasta Akademi Farmasi YPPM Mandiri Banda Aceh bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Banda Aceh dan turut juga hadir dosen dari Universitas Iskandar Muda serta Akademi Farmasi Makanan (AKAFARMA) Banda Aceh sebagai salah satu bentuk dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kerjasama yang baik antar kampus di Banda Aceh.

Pelatihan Manajemen

Memperhatikan latar belakang pengelola BUMG dan PKK Gampong Doy yang minim pengetahuan dan pengelolaan dalam mengelola usaha, maka solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan (workshop)

Materi pelatihan meliputi: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan. Disamping itu juga akan diberikan pelatihan tentang Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan, Manajemen Pemasaran dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Hasil dari pelatihan ini adalah agar para pengelola BUMG dan Ibu-ibu PKK Gampong Doy agar dapat menerapkan model manajemen yang tepat, meningkatkan kompetensi para pengelola BUMG dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan BUMG.

2. Pendampingan

Tujuan pendampingan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam upaya penyempurnaan alat dan pengelolaan BUMG dan PKK Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal.

Dokumentasi Kegiatan

Persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Manajemen/Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) bagi Ibu-Ibu PKK di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dilakukan sebagai berikut:



Gambar 2. Melakukan Pertemuan Membahas Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)



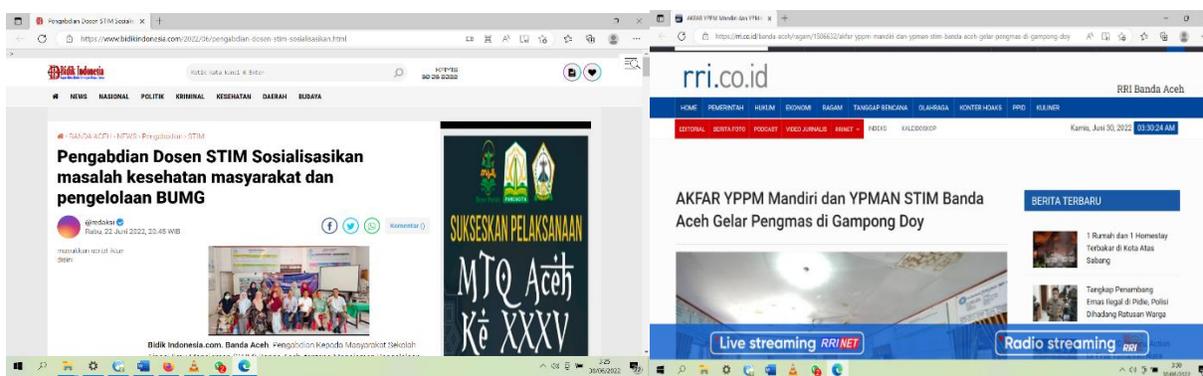
Gambar 3. Penyampaian Materi BUMG oleh Bapak Muhammad Munzir, S.H.,M.Si.



Gambar 4. Tanya Jawab dan Antusias Peserta PKM dalam Mengikuti Materi BUMG



Gambar 5. Foto Bersama Dosen dan Mahasiswa Beserta Ibu-Ibu PKK Desa Doy



Gambar 6. Informasi Hasil Kegiatan PKM pada Media Online

PENUTUP

Simpulan

Pengabdian ini merupakan kegiatan untuk memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan serta aplikasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi. Motivasi peserta sangat tinggi, hal ini terlihat dari antusiasnya peserta mengikuti sampai akhir program. Hasil pengamatan selama proses kegiatan ini berlangsung maka dapat dilihat bahwa rata-rata penerimaan materi yang disampaikan oleh instruktur cukup baik. Untuk lebih meningkatkan ketrampilan yang telah diperoleh maka perlu kiranya para peserta untuk lebih banyak berlatih dan mulai menerapkan dalam proses pengelolaan organisasinya.

Saran

Agar pengetahuan, ketrampilan dan aplikasi yang telah diberikan tidak hilang, maka perlu kiranya bagi Ketua Pengurus Badan Usaha Milik Gampong dan Ketua Pengurus PKK Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk memotivasi para anggotanya agar dapat berlatih dan mulai menerapkan manajemen dalam proses pengelolaan tugas-tugasnya. Untuk lebih banyak memperdalam dan memperoleh keterampilan yang mendukung kemajuan pengelolaan organisasi di Badan Usaha Milik Gampong dan PKK Desa Doy maka perlu kiranya ditingkatkan kerja sama dengan STIM Banda Aceh, khususnya sehubungan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dengan selesainya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan agar lebih mempererat hubungan dan

kerja sama antara Pengurus BUMG dan Pengurus PKK Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan STIM Banda Aceh.

REFERENSI

- Alfiansyah. (2021) *Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 5.
- BeritaSatu.com. (2022) *2.628 BUM Desa dan 40 BUM Desa Bersama Sudah Dapat Nomor Badan Hukum*, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/878749/2628-bum-desa-dan-40-bum-desa-bersama-sudah-dapat-nomor-badan-hukum>.
- DPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong) Aceh. (2021) *318 BUMG Aceh Terdaftar di Bumdes.id* <https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/318-bumg-aceh-terdaftar-di-bumdesid>, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh.
- Firdaus R. (2020) *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep*. Jurnal Inovasi Penelitian 1:1387-1394.
- Gusmeri, Fuad Z., Herawati N., Parmakope, Adnan M., Faisal F., Husna A. (2019) *Efektifitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Kurniawan A.E. (2016) *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Lokadata. (2020) *21 Ribu Desa di Indonesia Belum Memiliki BUMDes: Pada 2020*, <https://desa.lokadata.id/artikel/21-ribu-desa-di-indonesia-belum-memiliki-bumdes>.
- Maskan, M. et al., (2020) *Pelatihan Manajemen Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Ibu-Ibu PKK di Kecamatan Tegalweru Dau Kabupaten Malang*. Jurnal-Abdimas; ISSN: 2407-4357.
- Permendes. (2015) *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- UU_No.23. (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* Presiden Republik Indonesia, Jakarta.